

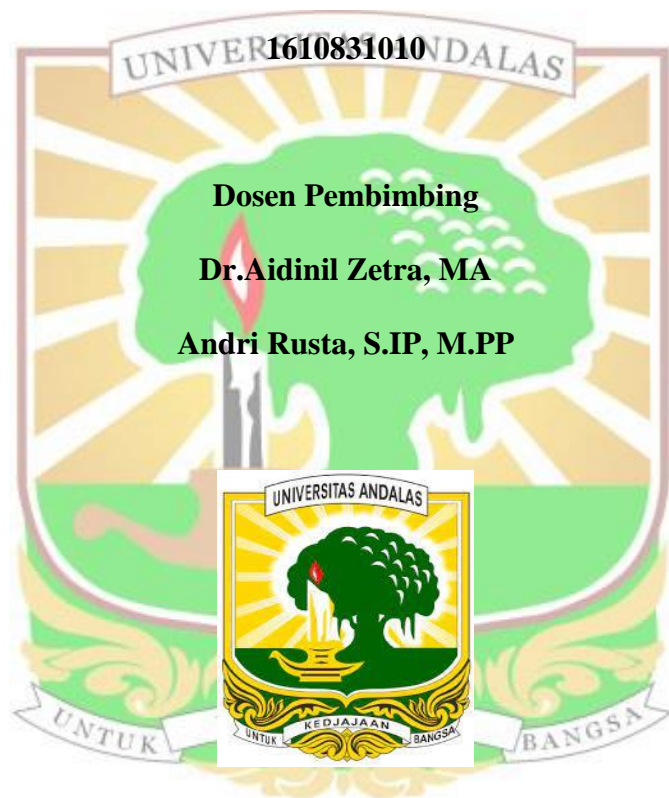
Konflik Kepentingan Politik Partai Koalisi Dalam Pengisian

Jabatan Wakil Walikota Padang

SKRIPSI

Oleh :

Husnul Fuad Arrafi



Dosen Pembimbing

Dr.Aidinil Zetra, MA

Andri Rusta, S.IP, M.PP

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

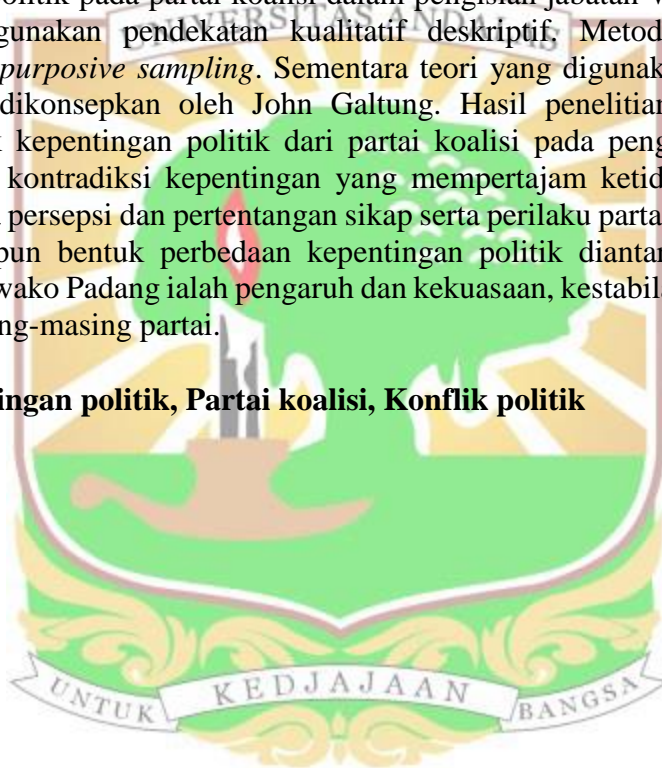
PADANG

2023

ABSTRAK

Kekosongan jabatan Wawako Padang telah terjadi semenjak tanggal 7 April 2021, hari dimana dilantiknya Hendri Septa sebagai Walikota seiring terpilihnya Walikota sebelumnya yaitu Mahyeldi, sebagai Gubernur Sumbar. Pihak DPRD Kota Padang sebagai legislatif mengaku telah sejak lama mendesak kedua partai koalisi pengusung pasangan Mahyeldi-Hendri Septa pada Pilkada 2018, untuk sesegara mungkin mengirimkan nama calon Wawako. Akan tetapi kedua partai, baik PAN maupun PKS, tidak pernah bersepakat dalam merundingkan pengisi jabatan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan politik diantara kedua partai koalisi tersebut. Permasalahan ini bertentangan dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menimbulkan keresahan pada masyarakat Kota Padang dalam menyikapi kosongnya jabatan Wawako. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik kepentingan politik pada partai koalisi dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sementara teori yang digunakan ialah Teori Segitiga Konflik ABC yang dikonsepsikan oleh John Galtung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teridentifikasi konflik kepentingan politik dari partai koalisi pada pengisian jabatan Wawako Padang yaitu adanya kontradiksi kepentingan yang mempertajam ketidaksesuaian partai yang berkoalisi, munculnya persepsi dan pertentangan sikap serta perilaku partai koalisi yang mengarah kepada konflik. Adapun bentuk perbedaan kepentingan politik diantara partai koalisi dalam pengisian jabatan Wawako Padang ialah pengaruh dan kekuasaan, kestabilan koalisi serta citra dan popularitas pada masing-masing partai.

Kata kunci : Kepentingan politik, Partai koalisi, Konflik politik



ABSTRACT

The vacancy in the position of Wawako Padang has occurred since April 7 2021, the day Hendri Septa was appointed as Mayor following the election of the previous Mayor, Mahyeldi, as the Governor of W Sumatra. The Padang City DPRD as the legislature admits that it has long urged the two coalition parties supporting the Mahyeldi-Hendri Septa pair in the 2018 Pilkada, to submit the names of candidates for Vice Mayor as soon as possible. However, the two parties, both PAN and PKS, have never agreed on negotiating a filler for the position. This raises suspicions of differences in political interests between the two coalition parties. In addition to this problem contradicting Article 89 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it has also caused unrest in the people of Padang City in responding to the vacant position of Wawako. This thesis aims to describe the identification of political interests in coalition parties in filling the position of Deputy Mayor of Padang. This study uses a descriptive qualitative approach. The method of selecting informants used a purposive sampling technique. While the theory used is the ABC Conflict Triangle Theory conceptualized by John Galtung. The results showed that the political interests of the coalition parties were identified in filling the position of Wawako Padang, namely the existence of conflicting interests that sharpened the incompatibility of coalition parties, the emergence of perceptions and conflicting attitudes and behavior of coalition parties that led to conflict. The forms of differences in political interests between coalition parties in filling the position of Wawako Padang are influence and power, coalition stability as well as the image and popularity of each party.

Keywords: Political interests, coalition parties, political conflict

